

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abd. Rasyid Salim, 2007. *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram (Hidayatul anam Bisyarhi Bulughul Maram min Adillati al Ahkam)*, penerj. Bahrun Abubakar Ihsan, Lc, Cet. 1, Bandung: Nuansa Aulia.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*. Kencana. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Reformasi hukum. Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Chairuddin, Gatta dan T. Supriyadi. 2008. *Kiat Menuju Minus (-19%) MD Demi Terwujudnya "Zero Fatal Traffic Accident" di Jawa Tengah*. CV. Liandra Citra Pesona. Semarang.
- Daliyo, J.B.. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*. Prenhallindo. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1991. *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 2016. *LKIP Ditlantas Polda Jateng Tahun 2015*. Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Semarang.

- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Effendy, Marwan. 2012. *Diskresi. Penemuan Hukum. Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Referensi. Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H.A. Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodelogi Research Jilid 1*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Latihan Ujian Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2010. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*. diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Nusamedia. Bandung.
- Kunarto. 1996. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- 1999. *Merenungi Kiprah Polri dalam wacana Reformasi*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Lemek, Jeremias. 2007. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Galangpress. Yogyakarta.
- M. Faal.. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut UU No. 32 Tahun 2009*. Graha Ilmu. Yogyakarta

- Mahfud MD dkk. 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Pogresif Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute. Jakarta.
- Marmosudjono, Sukarton. 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Marpaung, Laden. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012 *Teori Hukum Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mujiyono. 2010. *Membudayakan Tertib Berlalu Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Menciptakan KAMSELTIBCAR LANTAS di Wilayah Jawa Tengah*. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah. Semarang.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif*. (diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien). Nusamedia. Bandung.
- Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama. Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2009. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- , 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqih Sunnah jilid 3*, diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet. I
- Silalahi, Daud. 1992. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Subardjo. 2009. *Diktat Metode Penelitian Ilmu Hukum (MPIH)*. Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta.
- Suhendang, Endang. 2013. *Pengantar Ilmu Kehutanan Edisi 2*. Bogor: IPB Press.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Susilo, Djoko. 2009. *Perkembangan Pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Direktorat Lalu Lintas POLRI. Jakarta.
- Sutandyo. 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma. Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian kebijaksanaan kriminalisasi dan dekriminalisasi*, Cet I, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Tiena Masriani, Yulies. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda*, Cet.I, Jakarta: Gema Insani.
- Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Cet. 1

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor.11, 12, 13, 14.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1528.

Internet

<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 05 Desember 2016.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/18/058828707/bus-handoyo-terguling-di-pemalang-8-penumpang-meninggal> diakses tanggal 28 Desember 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak diakses tanggal 3 Januari 2017

<http://hubdat.dephub.go.id/spesial-konten/dokumen-publikasi/umum/845-sosialisasiu-22tahun2009/> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2009 diakses tanggal 6 Januari 2017.

INFORMAN :

1. Kopol Widada, S.H, M.H selaku Kasi Laka Ditlantas Polda Jateng
2. AKP Umbar Wijaya, SH selaku Kasat Lantas Polres Demak
3. Aiptu Sudirman, SH anggota Unit Laka Kapok II
4. Aipda Fajarudin anggota Unit Laka Kapok III
5. Bripka Andang Saputro, SH, MH anggota Unit Laka Kapok I
6. Bripka Sukarjo, SH anggota Unit Laka

PERTANYAAN

1. Apa pertanggungjawaban sanksi pidana seorang pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Apa dasar hukum penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan ?
3. Pasal berapa dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan?
4. Apa ancaman hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas ?
5. Bagaimana dalam perkara kecelakaan lalu lintas terhadap pihak kedua korban luka-luka atau meninggal, namun pihak pertama tidak memberikan bantuan. ?
6. Apa pihak pertama bisa dikenakan ancaman hukuman dan merujuk dalam aturan perundang-undangan ?
7. Apa perdamaian dapat menghilangkan tuntutan pidana terhadap si pengemudi yang menyebabkan kecelakaan ?
8. Apa ada prioritas dalam penindakan jenis pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan laka lantas dan fatalitas korban kecelakaan ?
9. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan tindakan pidana kecelakaan lalu lintas ?
10. Upaya apa saja dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas ?
11. Upaya apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam tindakan pidana kecelakaan lalu lintas ?
12. Bagaimana prosedur tindakan penyidikan oleh kepolisian dalam kecelakaan lalu lintas ?